

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang Masalah

Kementerian Keuangan memberikan data bahwa pada tahun 2021, kontribusi perpajakan kepada pendapatan negara adalah lebih dari 1.444,5 triliun rupiah (sekitar 82%) dari total 1.743,6 triliun rupiah. Persentase ini menunjukkan betapa besar dan pentingnya peran pajak dalam membiayai kebutuhan negara sehingga pajak harus dikelola secara optimal dan penuh tanggung jawab untuk menopang keberlangsungan negara dan perekonomian nasional.

Dalam hal ini, Bendaharawan Pemerintah menempati posisi strategis dan berpengaruh sebagai bagian dari pengelola keuangan negara, terutama dalam optimalisasi pengumpulan penerimaan negara.

Para Bendaharawan Pemerintah tentu terlibat langsung dalam belanja negara ini. Mekanisme dan perihal perpajakan pula terdapat di dalamnya. Begitu mendesaknya kepatuhan pajak Wajib Pajak Bendaharawan Pemerintah, sehingga menjadi penting untuk diutamakan sebagai bagian dari optimalisasi penerimaan pajak pada pendapatan negara.

Namun, kontradiksi terjadi dalam realisasinya, sesuai data Kementerian Keuangan, yang berhubungan dengan kegiatan perpajakan dari Bendaharawan Pemerintah tergolong kecil, adalah di bawah 8% , Atau, dapat dikatakan bahwa kepatuhan Bendaharawan Pemerintah masih belum optimal.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan perhatian berupa langkah-langkah dan upaya peningkatan kepatuhan pajak Bendaharawan Pemerintah selama ini. Dalam hal ini, penyuluhan dan pemaparan sudah sering dilakukan oleh kantor pajak secara berkala dan berkelanjutan. Setiap tahun, sosialisasi kepada Bendaharawan Pemerintah menjadi target Rencana Kerja Penyuluhan. Tetapi pada kenyataannya, masih ada juga Bendaharawan Pemerintah yang belum mengerti dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara lengkap dan menyeluruh.

Berkaitan dengan Pelayanan Perpajakan, dapat dioptimalkan peran dan fungsi Bendaharawan Pemerintah sebagai mitra pemerintah dalam perpajakan yang berfungsi memotong dan memungut pajak,. Hal ini dapat dilihat melalui kegiatan Penyuluhan oleh Petugas Pajak. Seperti dikutip

dari Instagram KPP Pratama Medan Barat, @pajakmedanbarat , terkait Penyuluhan PPh untuk Bendaharawan di lingkungan KPP Pratama Medan Barat yang telah dilaksanakan pada Maret 2021.

Berdasarkan semua uraian inilah, peneliti perlu untuk meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penyuluhan Pajak serta Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan Bendaharawan Pemerintah.

I.2 Tinjauan Pustaka

Kepatuhan Pajak

Beberapa pendapat ahli mengenai pengertian dari kepatuhan pajak. Menurut Mangoting & Jotopurnomo (2016), kepatuhan pajak merupakan dimana seorang Wajib Pajak paham akan peraturan undangundang pajak, dapat mengisi formulir pajak secara lengkap, dengan benar menghitung jumlah pajak serta , tepat waktu dalam membayar pajak.

I.2.2 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Resmi (2019:22), suatu proses yang harus dilalui oleh seorang wajib pajak untuk memahami pajak dan mengimplementasikannya dalam pelaporan pajaknya.

I.2.3 Pelayanan Pajak

Pelayanan pajak merupakan bagian dari pelayanan publik. Pelayanan perpajakan tersebut diharapkan memperhatikan kualitas dan standar pelayanan terhadap Wajib Pajak sebagai usaha kantor pelayanan pajak untuk menjamin kepuasan Wajib Pajak yang optimal agar Wajib Pajak menjaga kepatuhan secara sukarelanya. Petugas pajak harus memberikan pelayanan yang adil, ramah dan tegas kepada setiap Wajib Pajak tanpa pernah membedakan pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang prima ini diharapkan menjadi bagian yang melekat dalam setiap kegiatan pelayanan Petugas Pajak kepada Wajib Pajak.

I.3 Teori Pengaruh

I.3.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Bendahara Pemerintah

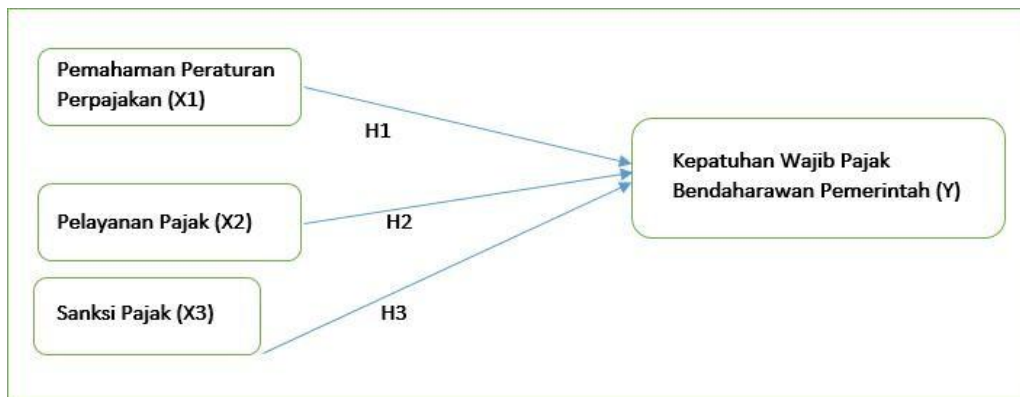
Pemahaman peraturan perpajakan dalam pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak adalah jika pengetahuan yang dimiliki wajib pajak semakin baik, maka akan membuat wajib pajak semakin sadar terhadap konsekuensi yang dilanggar jika tidak melaksanakan aturan tersebut sesuai petunjuk undang-undang. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak memiliki pemahaman yang cukup baik akan peraturan perpajakan, maka akan berdampak kepada tingginya peluang pelanggaran akan ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan tersebut. Tingkat pemahaman peraturan perpajakan yang baik akan membentuk dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan tingkat pemahaman yang rendah akan berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Bendaharawan Pemerintah

Pendapat menurut Siamena, Sabijono dan Warongan tahun 2017 telah menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib orang pribadi di kota Manado. Dimana semakin tegas sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Penerapan sanksi telah dituangkan dengan jelas pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan tahun 2021.

I.4 Hipotesis Penelitian

Tabel 1
Kerangka Penelitian



- H1 : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bendaharawan
- H2 : Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bendaharawan
- H3 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bendaharawan

